



Master Plan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022

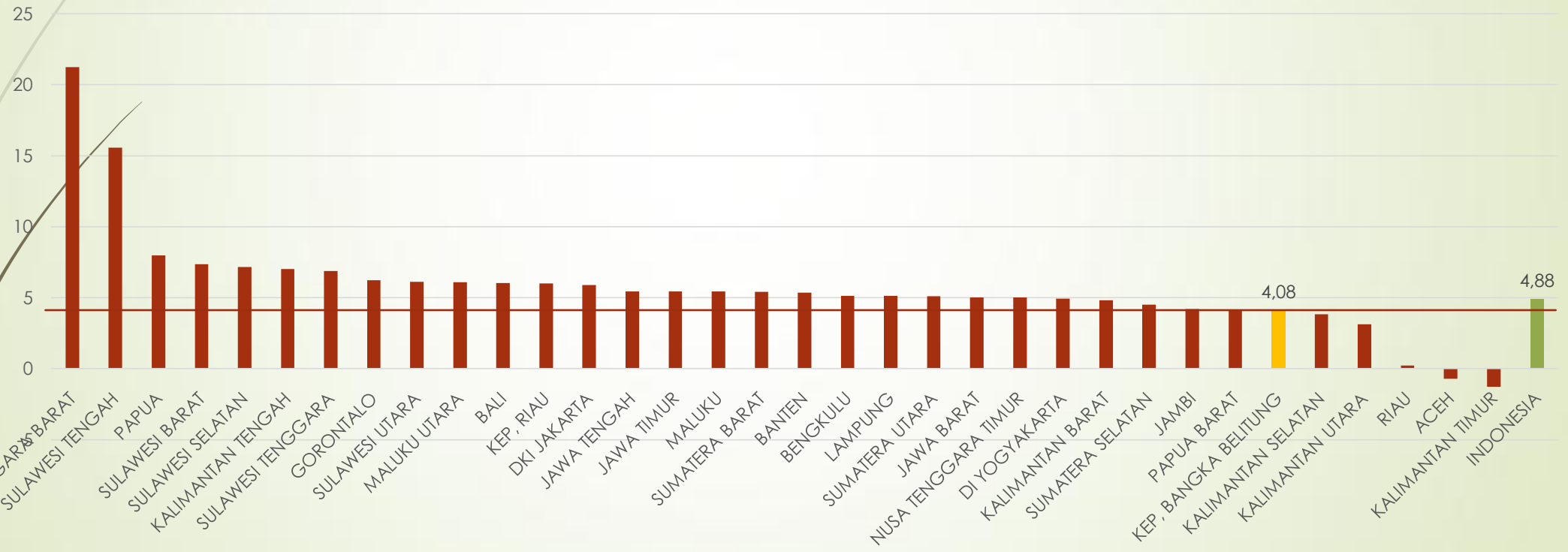
Tim Transisi Bidang Ekonomi



Posisi Relatif Indikator Pembangunan

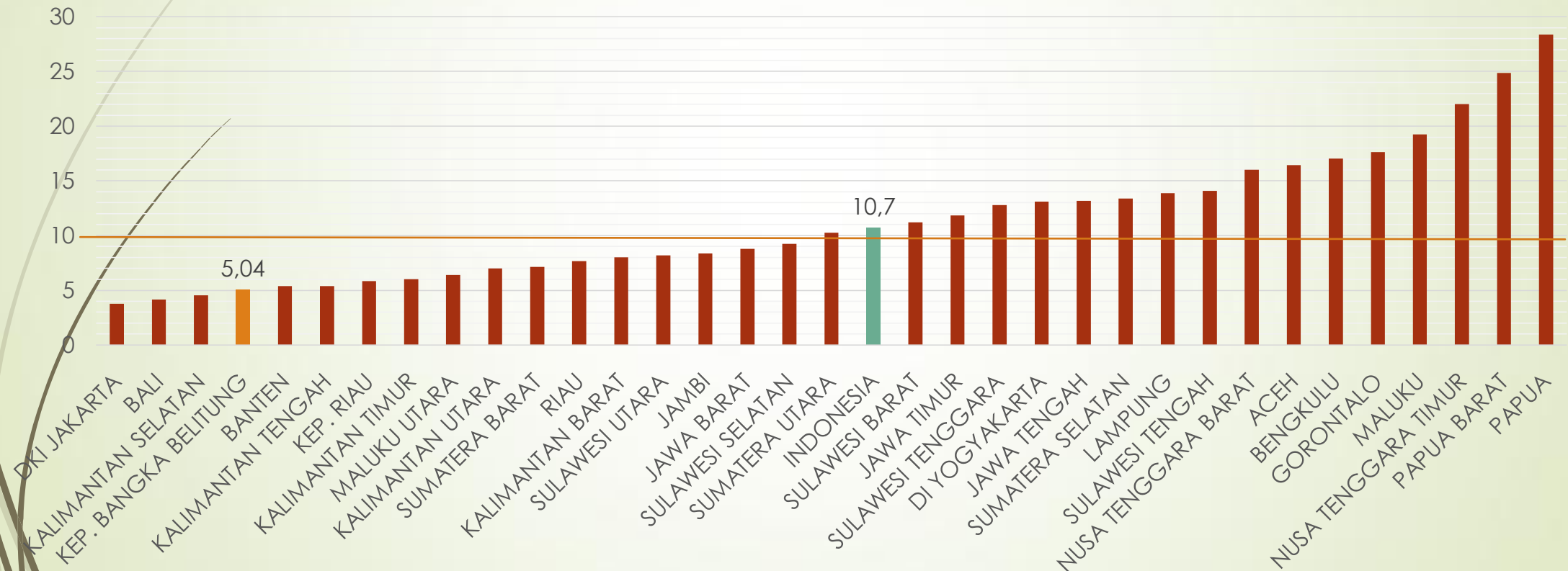
Posisi Relatif Laju Pertumbuhan PDRB Prov. Kep. Bangka Belitung di Indonesia 2015

Laju Pertumbuhan PDRB (sumber: BPS)



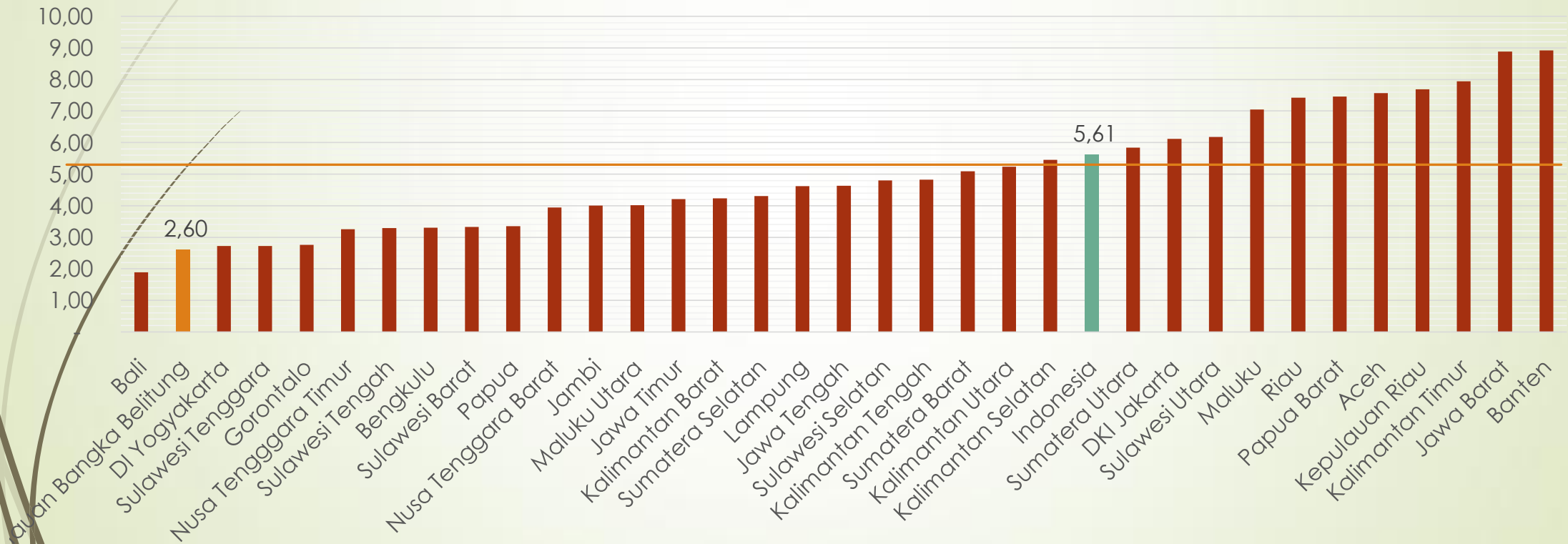
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Prov. Kep. Bangka Belitung di Indonesia 2016

Persentase Penduduk Miskin (sumber: BPS)



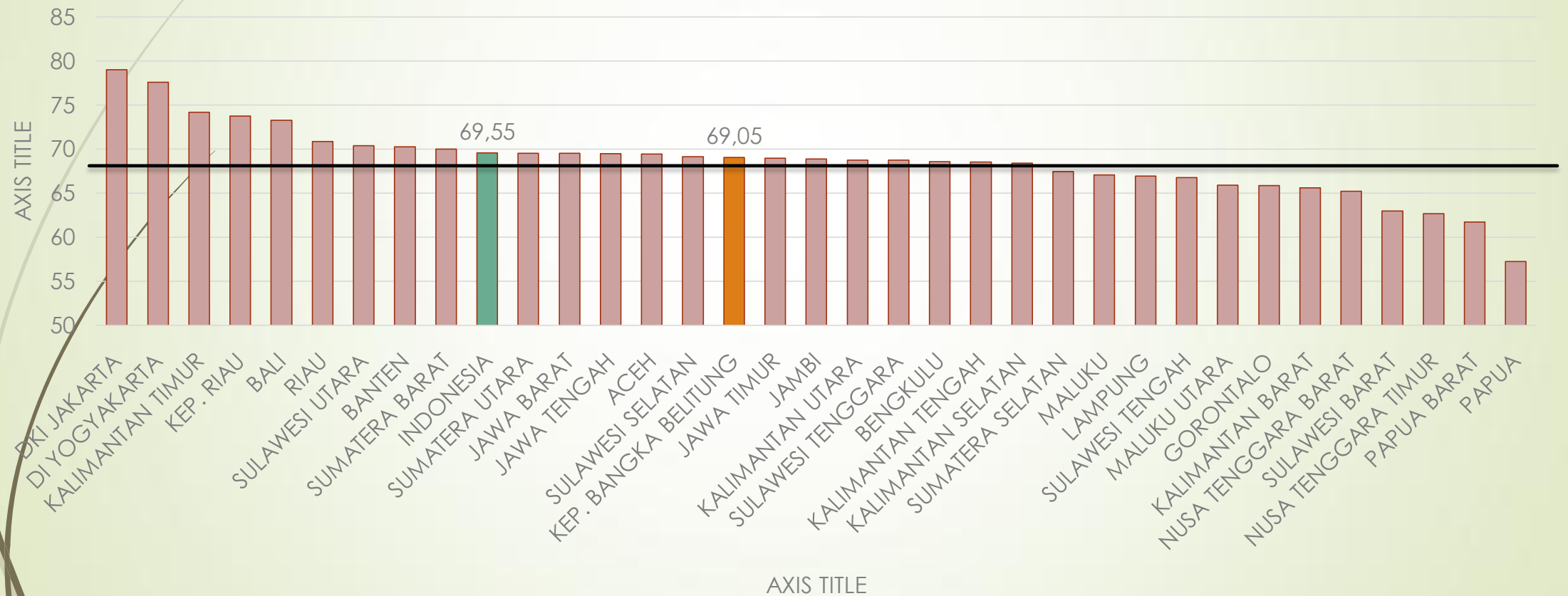
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Prov. Kep. Bangka Belitung di Indonesia 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (sumber: BPS)



Posisi Relatif IPM Prov. Kep. Bangka Belitung di Indonesia 2015

Indeks Pembangunan Manusia (sumber: BPS)

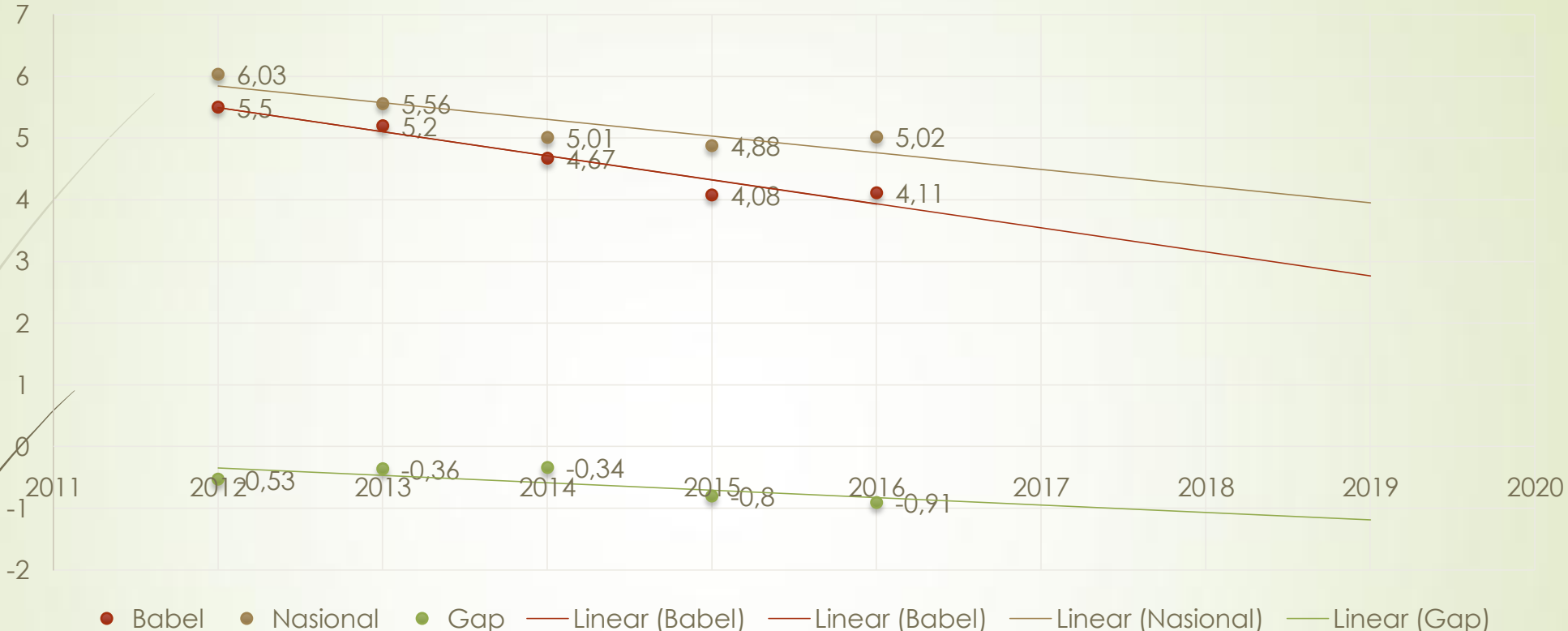


Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung di Indonesia 2014

Angka Harapan Hidup (sumber: BPS)



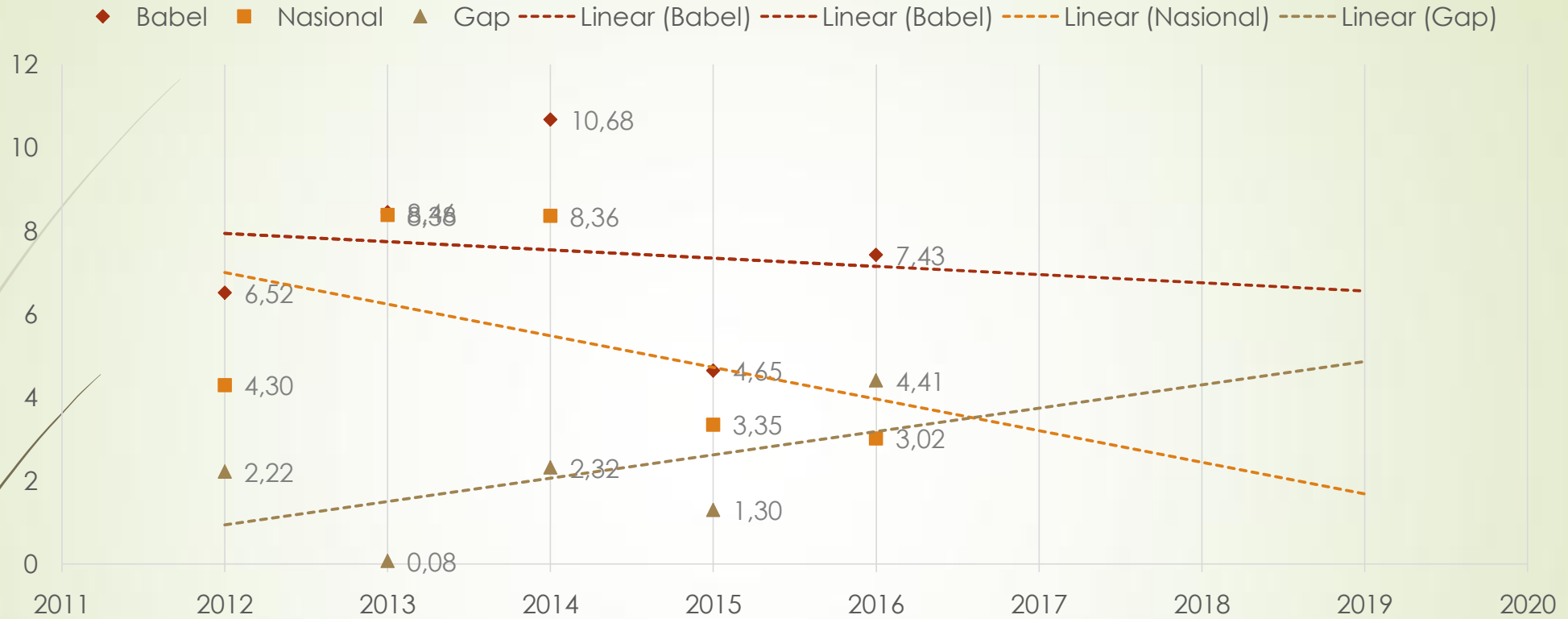
Laju Pertumbuhan PDRB (Sumber: BPS)



BASELINE	2012	2013	2014	2015	2016
Babel	5,5	5,2	4,67	4,08	4,11
Nasional	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02
Selisih	-0,53	-0,36	-0,34	-0,8	-0,91

- Laju pertumbuhan PDRB masih di bawah laju pertumbuhan nasional dengan gap yang cenderung melebar
- Fokus: Mengurangi Gap untuk mengejar ketertinggalan

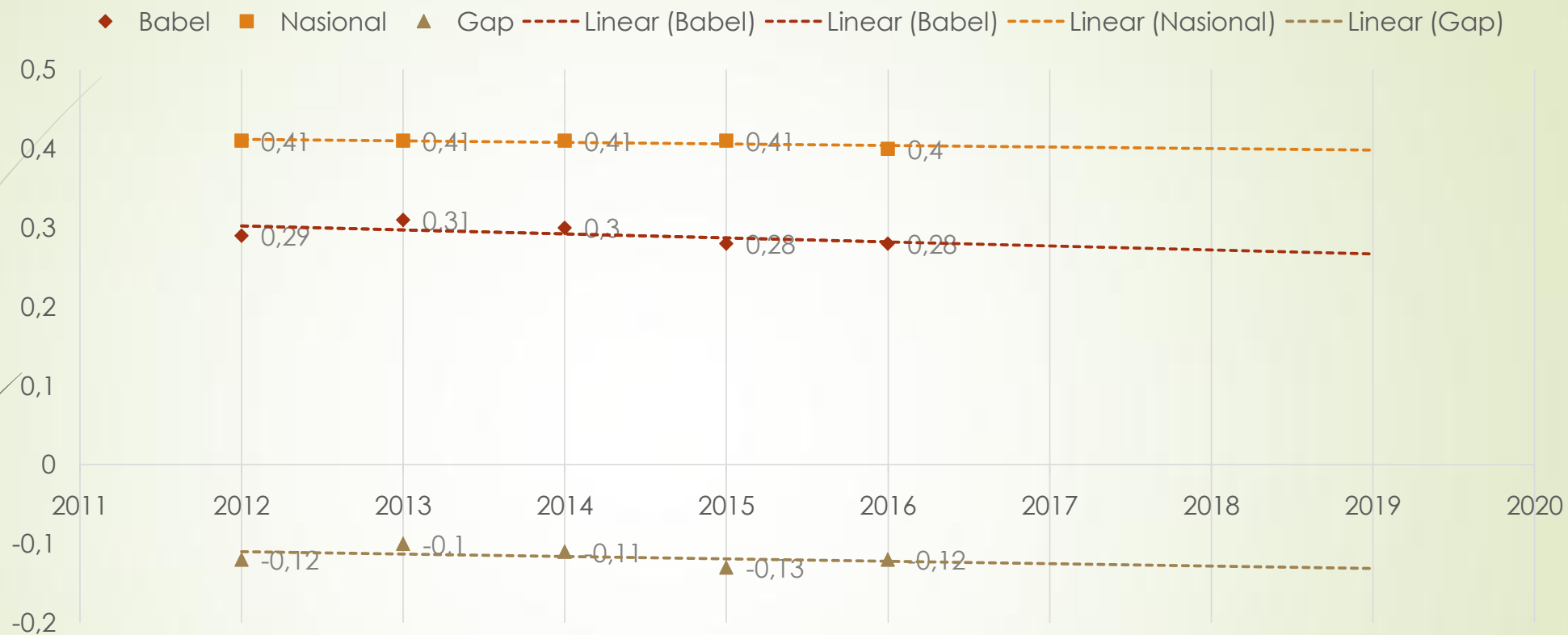
TINGKAT INFLASI (SUMBER: BPS)



BASELINE	2012	2013	2014	2015	2016
Babel	6,52	8,46	10,68	4,65	7,43
Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02
Selisih	2,22	0,08	2,32	1,30	4,41

- Tingkat Inflasi di Kota Pangkal Pinang masih di lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional.
- Meskipun tingkat inflasi cenderung menurun, penurunan tingkat inflasi di Babel tidak sebesar penurunan inflasi Nasional

KOEFISIEN GINI (SUMBER: BPS)



BASELINE	2012	2013	2014	2015	2016
Babel	0,29	0,31	0,30	0,28	0,28
Nasional	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40
Selisih	-0,12	-0,10	-0,11	-0,13	-0,12

- Koefisien Gini Babel lebih rendah dibandingkan Nasional dengan kecenderungan semakin merata
- Fokus mempertahankan kinerja

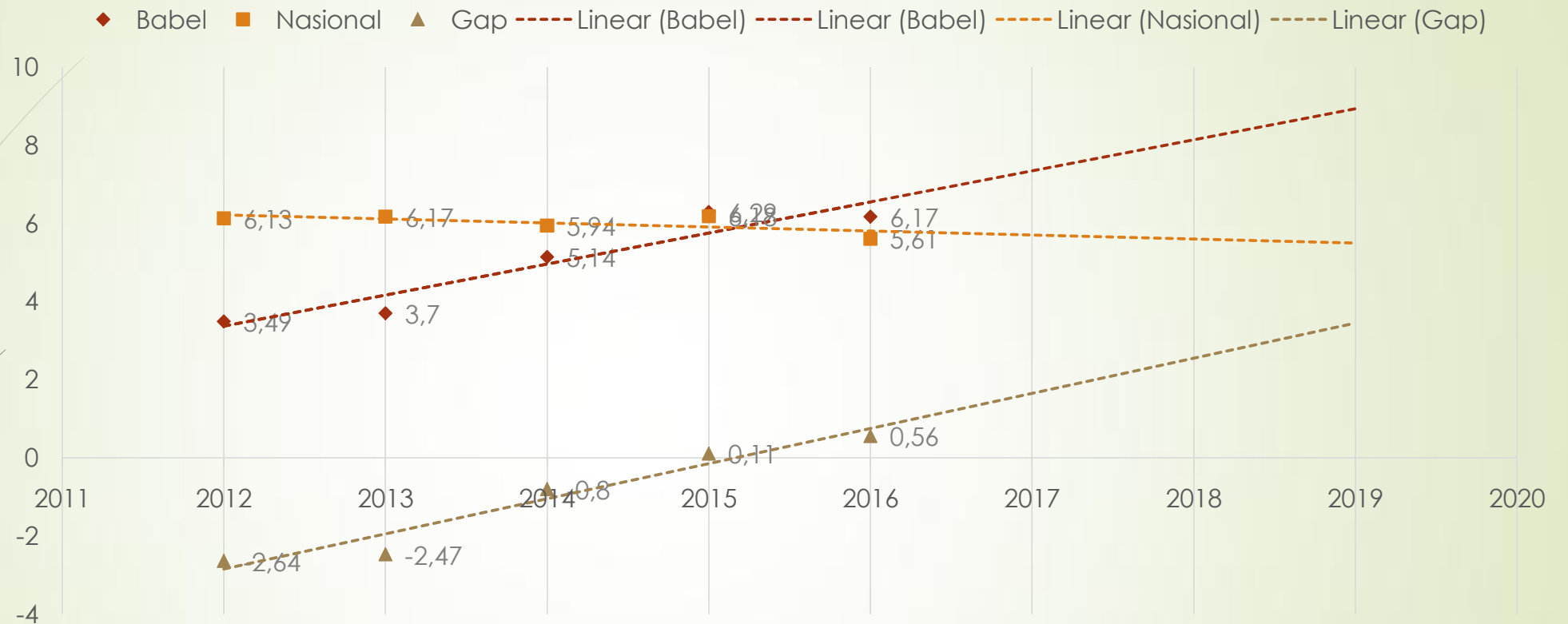
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (SUMBER: BPS)



BASELINE	2012	2013	2014	2015	2016
Babel	5,37	5,25	4,97	4,83	5,04
Nasional	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70
Selisih	-6,29	-6,22	-5,99	-6,30	-5,66

- Babel memiliki persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dengan gap yang semakin menurun.
- Fokus: peningkatan kinerja untuk mempertahankan gap

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (SUMBER: BPS)



BASELINE	2012	2013	2014	2015	2016
Babel	3,49	3,70	5,14	6,29	6,17
Nasional	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61
Selisih	-2,64	-2,47	-0,80	0,11	0,56

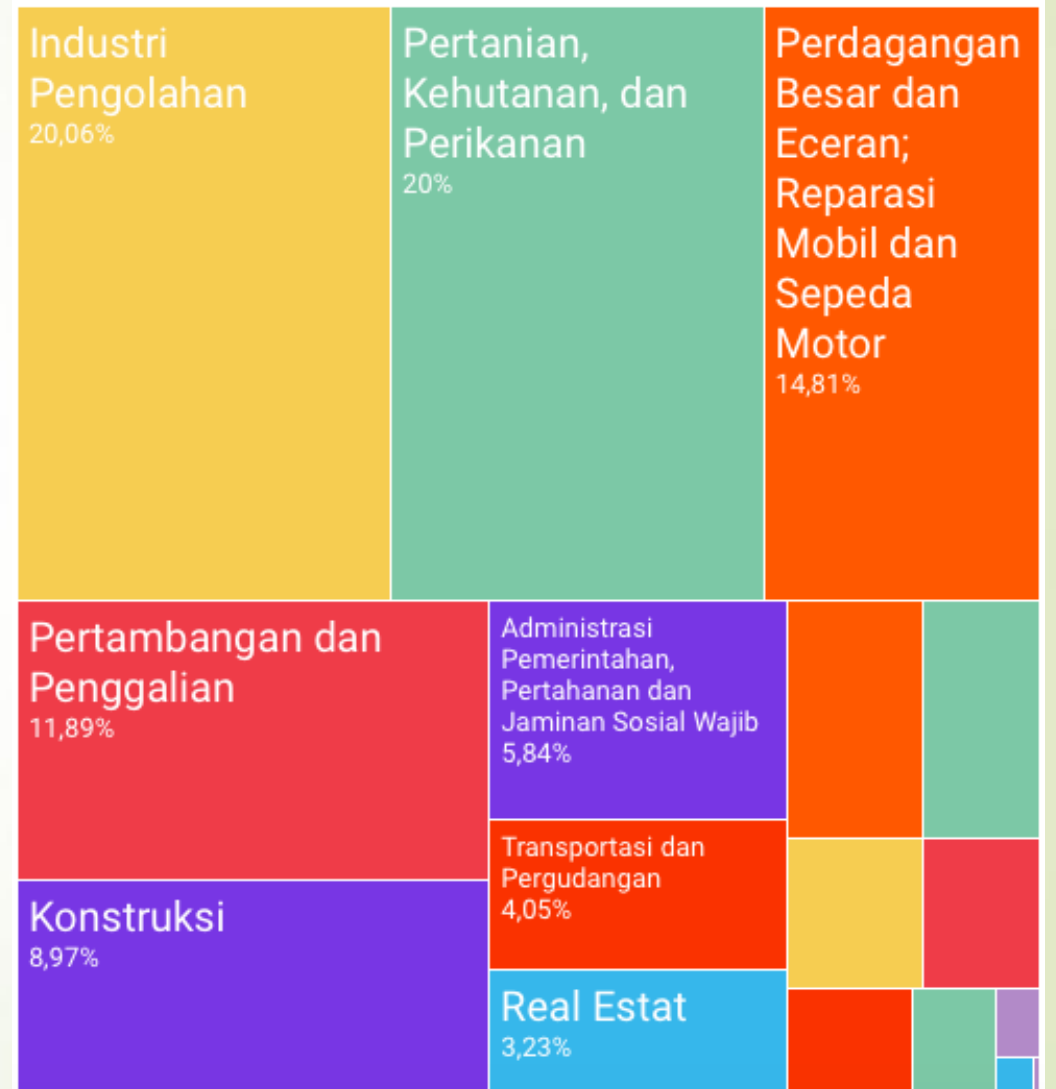
- Meskipun sempat memiliki TPT lebih rendah dibandingkan nasional, namun TPT justru meningkat melebihi TPT nasional yang cenderung turun.
- Fokus: peningkatan kinerja untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan



Permasalahan dan Prioritas Pembangunan

Permasalahan Pembangunan

- Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer
- Tingkat Investasi Swasta Rendah
- Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Rendah
- Kualitas SDM masih rendah
- Kualitas Belanja Daerah Rendah
- Kerusakan Lingkungan
- Pembangunan Belum Merata
- Pengangguran Meningkat
- Kemandirian Pangan Rendah
- Illegal Fishing dan Perampokan laut
- Kemandirian Fiskal Rendah
- Koordinasi Pembangunan Rendah
- Pasokan Energi Kurang
- Angka Putus Sekolah Tinggi



Kontribusi Sektor tahun 2016 (sumber: BPS Prov Kep Bangka Belitung)



Prioritas Pembangunan 5 Tahun Ketiga dalam RPJP

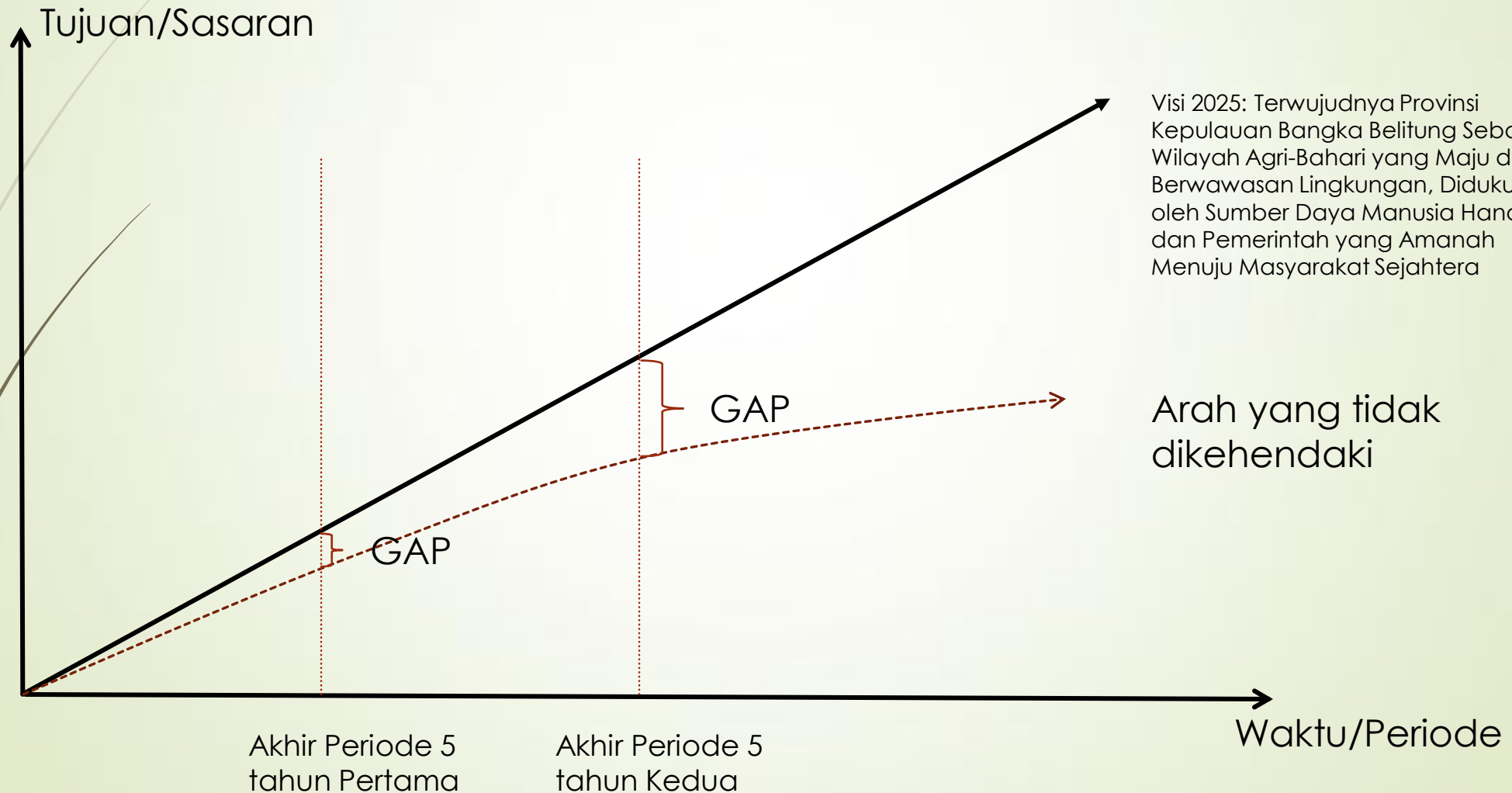
- ▶ Periode 2017-2022 merupakan periode 5 tahun ketiga dalam RPJP 2005-2025 dengan Fokus:
 - ▶ **Ekonomi dan Pengembangan Kualitas SDM**
- ▶ Prioritas Pembangunan pada periode ini adalah:
 1. Ekonomi dan SDA
 2. SDM & Kependudukan
 3. Sarana dan Prasarana
 4. Pemerintahan
 5. Sosial, Budaya dan Politik
 6. Lingkungan Hidup

Indikator Capaian Misi 1 RPJP

Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi 2005	Kondisi Saat ini (2016)	Indikator Capaian
			2017–2022
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas ADH Konstan (Persen)	4,5 (2005)	3,01 (2013)	5,45
Rata-rata kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	22,94	20,00	23,96
Rata-rata kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	0,05	6,55	0,20
Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	22,03	20,06	22,69
Rata-rata kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	13,81	17,28	13,60
Rata-rata kontribusi sektor Pengangkutan dan Komunikasi (%)	3,29	5,64	2,74
Rata-rata kontribusi sektor Jasa-jasa terhadap PDRB	6,14	6,95	5,41
Peningkatan Peran UKM Jumlah Unit Usaha kecil	1.042		1.200

Pencapaian Tujuan/Sasaran dalam Rangka Mewujudkan Visi Jangka Panjang





Paket Kebijakan Ekonomi

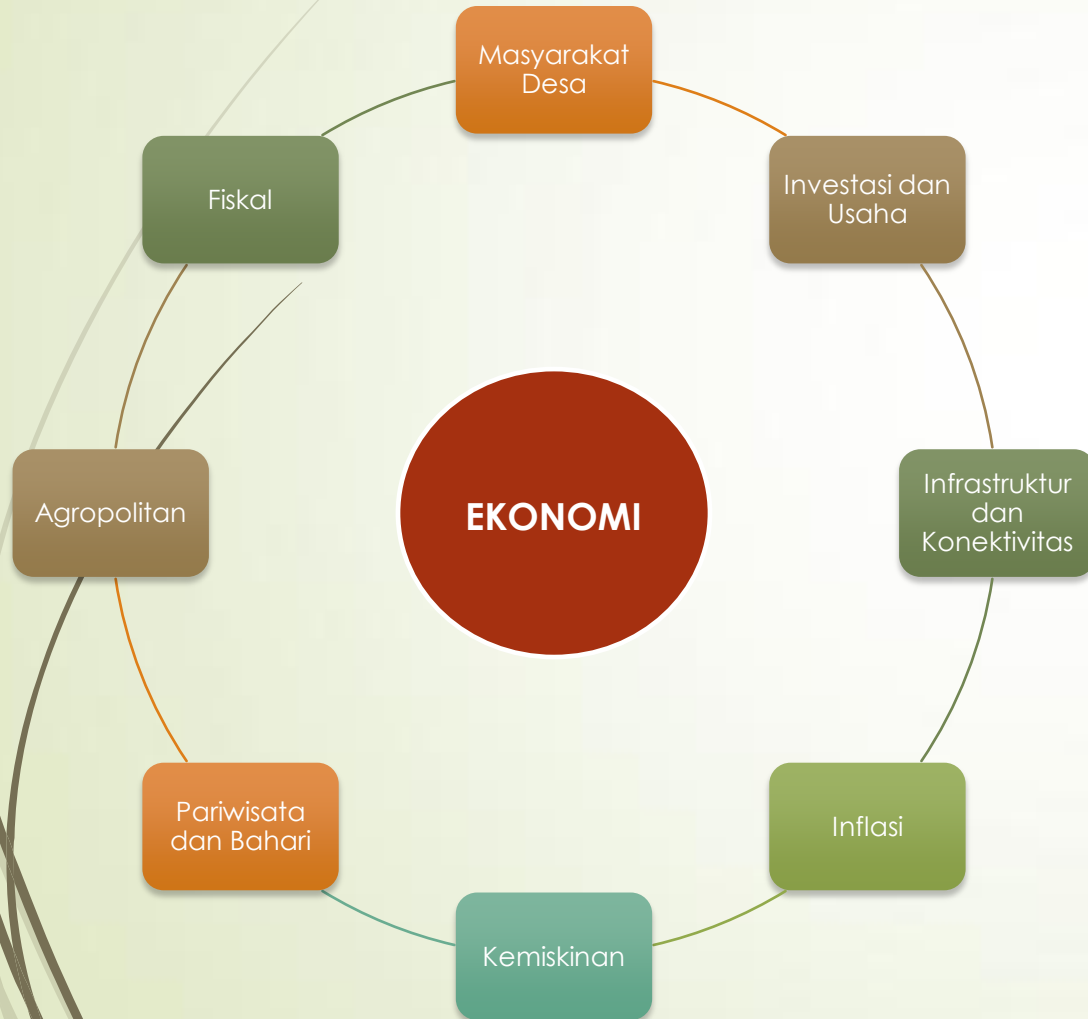
Interlinked Sector



Meskipun pada prakteknya perlu adanya sektor yang menjadi prioritas pembangunan, seluruh sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang saling berhubungan dalam meningkatkan kemajuan daerah.

Pemilihan prioritas pembangunan didasarkan pada ukuran Dampak Keberhasilan, Kemungkinan Keberhasilan, dan Urgensi dari Program Pembangunan.

Interlinked Policy



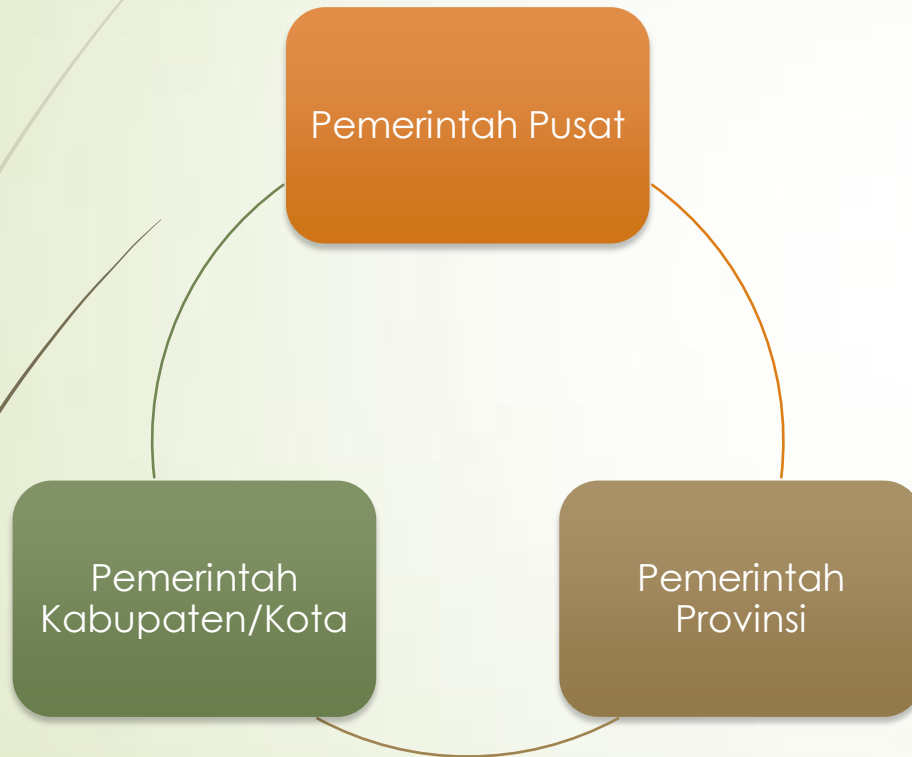
➤ Tujuan Utama Paket Kebijakan Ekonomi:

- Pertumbuhan Ekonomi
- Penurunan Inflasi

➤ Indikator Utama yang disasar:

- Pertumbuhan PDRB
- Angka Inflasi
- Angka Gini
- Persentase Penduduk Miskin
- Tingkat Pengangguran Terbuka

Interlinked Authority

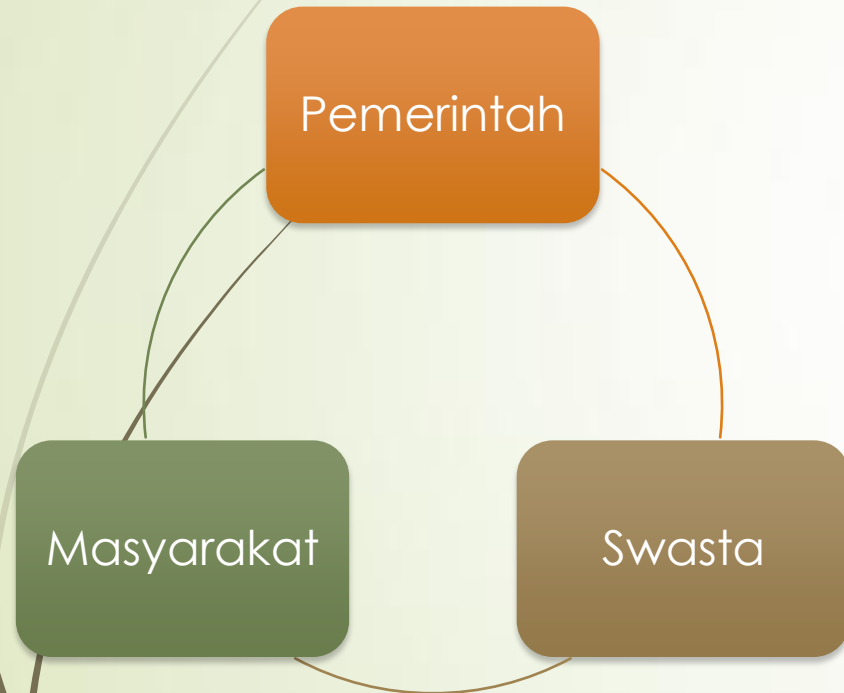


Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi:

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Fokus: Peningkatan Koordinasi untuk menjamin keselarasan program pembangunan dari level pusat hingga ke daerah.

Public, Private and People Partnership (4Ps)



Pemerintah Daerah perlu melibatkan pihak Swasta dan Masyarakat dalam proses pembangunan daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi.

Fokus:

1. Melibatkan pihak swasta dalam meningkatkan perekonomian daerah baik melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) maupun Investasi Langsung.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Tema Pembangunan Ekonomi Tahun 2018-2022

2018 Meletakkan Dasar

- Rencana Strategis
- Rencana Induk
- Penataan Kawasan
- Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- Penguatan Basis Data
- Konektivitas

2019 Membangun dan Memantapkan Dasar

- Penguatan Kelembagaan
- Peningkatan Infrastruktur
- Pengembangan Kawasan
- Peningkatan Kapasitas SDM
- Peningkatan Investasi

2020 Mendayagunakan dan Memperkuat

- Pengembangan Agropolitan dan Bahari
- Pengembangan Wisata
- Peningkatan PAD
- Pelayanan Masyarakat

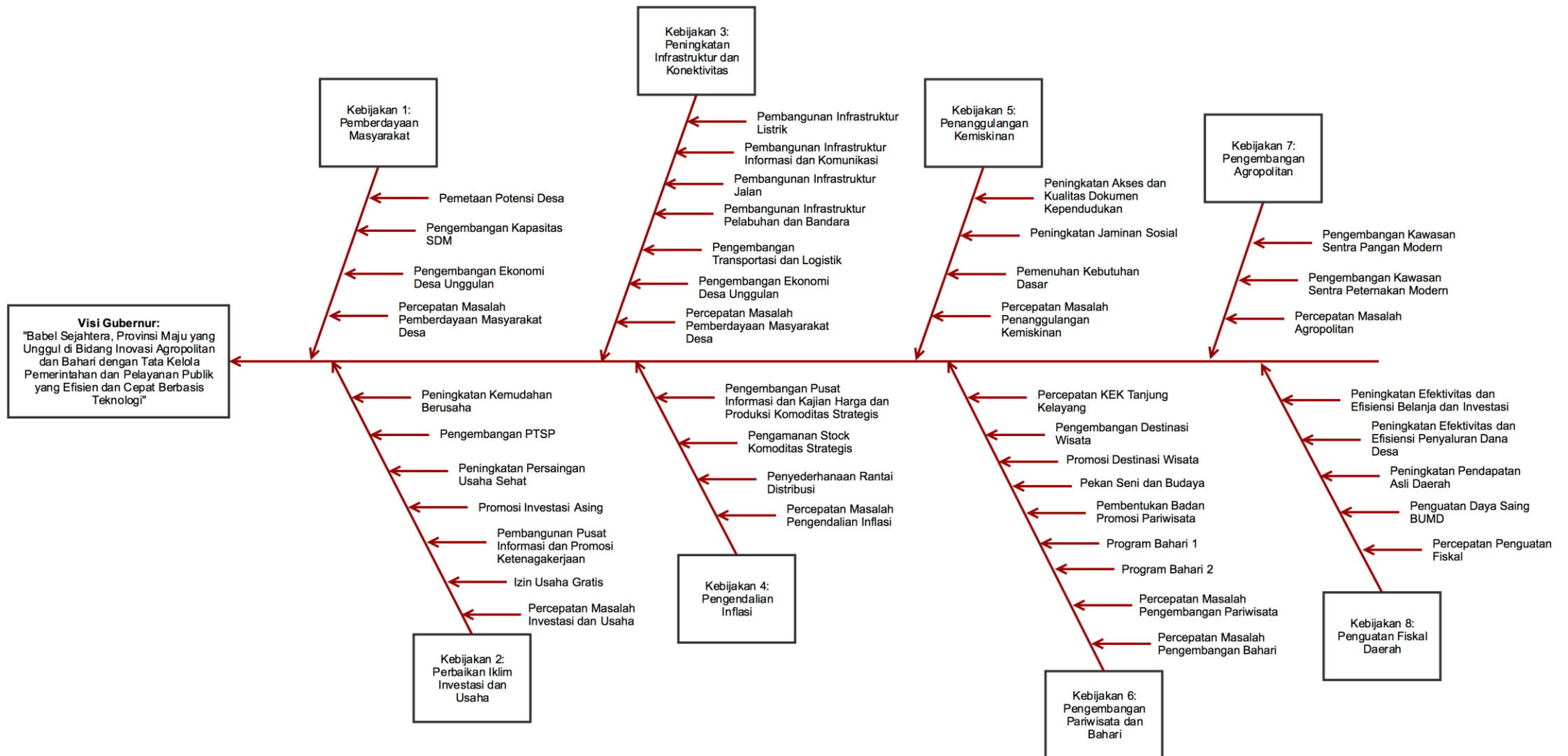
2021 Mendayagunakan dan Memantapkan

- Pengembangan Industri Pendukung
- Peningkatan Tenaga Kerja
- Peningkatan Kerjasama Pemerintah-Swasta

2022 Mendayagunakan dan Mengoptimalkan

- Pengembangan UMKM dan Koperasi
- Peningkatan Kapasitas BUMD

Ishikawa Diagram Paket Kebijakan Ekonomi



Paket 1: Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program	Kegiatan	Aktivitas
Program Pemetaan Potensi Desa	Pemetaan Potensi fisik Desa	
	Pemetaan Potensi non fisik	
Program Pengembangan Kapasitas SDM	Pemberdayaan inklusif masyarakat desa	
	Advokasi kesadaran kritis warga desa	
	Peningkatan kapasitas masyarakat desa	Pelatihan kewirausahaan Inkubasi bisnis Pelatihan teknologi informasi
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Pembentukan BUMDes (i.e. Koperasi) Pendampingan BUMDes
Program Pengembangan Ekonomi Desa Unggulan	Inklusi keuangan	Peningkatan pelayanan perbankan pada BUMDes Temu investor
	Pengembangan komoditas unggulan	
	Perdagangan	Revitalisasi pasar tradisional Pengembangan toko swalayan berbasis BUMDes
	Pemanfaatan Dana CSR dalam Pengembangan Ekonomi Unggulan Desa	Pemetaan Potensi Kegiatan Ekonomi Pengembangan Sistem e-CSR
	Pengembangan Industri kreatif	Rumah display
Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Masalah	Pengisian jabatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	

Paket Kebijakan Ekonomi 2: Perbaiki Iklim Investasi dan Usaha

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Kemudahan Berusaha	Penyederhanaan prosedur perizinan Deregulasi regulasi perizinan
Program Pengembangan PTSP	Pelimpahan kewenangan Verifikasi perizinan satu pintu Pelayanan Informasi Perizinan Secara Online
Program Peningkatan Persaingan Usaha Sehat	
Program Promosi Investasi Asing	Peningkatan koordinasi penanganan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)
Program Pembangunan Pusat Informasi dan Promosi Ketenagakerjaan	
Program Izin Usaha Gratis	Pemberian Insentif Pelayanan Penanaman Modal
Program Percepatan Masalah Investasi dan Usaha	Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR kawasan strategis Percepatan pengaduan masalah investasi Percepatan pengaduan masalah ketenagakerjaan Percepatan peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM PTSP Percepatan pengadaan kendaraan operasional PTSP Percepatan pengadaan dan kualitas bahan promosi/materi investasi Menurunkan suku bunga KUR Perluasan penerima KUR disertai pendampingan

Paket Kebijakan Ekonomi 3: Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Program	Kegiatan
Program Pembangunan Infrastruktur Listrik	Peningkatan Kapasitas Produksi Listrik Wilayah
Program Pembangunan Infrastruktur Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Jangkauan Akses Komunikasi Wilayah
Program Pembangunan Infrastruktur Jalan	Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Jalan Penghubung antar Wilayah
Program Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan dan Bandara	Peningkatan Status dan Kapasitas Pelabuhan dan Bandara
Program Tol Laut	Tol Laut National Tol Laut Provinsi
Program Pengembangan Transportasi dan Logistik	Sarana dan prasarana bongkar muat pelabuhan Perbaikan pelayanan bongkar muat pelabuhan Penerapan Indonesia National Single Window (INSW)
Program Percepatan Masalah Infrastruktur	Memastikan pelelangan terjadi pada awal tahun anggaran Memastikan Renstra tersusun dengan baik dan tepat waktu Peningkatan peran BKPRD Penambahan SDM dibidang tata ruang yang berkompetensi Penyelesaian permasalahan P3D Pendataan tanah hasil pembebasan lahan Tindaklanjut uang ganti rugi pembebasan tanah
Program Percepatan Masalah Konektivitas	Desa broadband terpadu Peningkatan kapasitas SDM Dinas Perhubungan Pembenahan rencana tata kelola transportasi Penyediaan trayek angkutan mendukung jalur utama logistik Penyediaan trayek angkutan perintis

Paket Kebijakan Ekonomi 4: Pengendalian Inflasi

Program	Kegiatan
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Kajian Harga dan Produksi Komoditas Strategis	Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah
Program Pengamanan Stok Komoditas Strategis	Pembangunan fasilitas pergudangan dan cold storage
	Belanja komoditas strategis berbasis kestabilan harga
Program Penyederhanaan Rantai Distribusi	Peningkatan Peran Tol Laut dalam distribusi barang
Program Percepatan Masalah Pengendalian Inflasi	Pengadaan layar harga komoditas di pasar utama
	Operasi pasar

Paket Kebijakan Ekonomi 5: Penanggulangan Kemiskinan

Program	Kegiatan
Program Akses dan Kualitas Dokumen Kependudukan	Penyusunan Sistem Informasi Layanan Kependudukan Layanan Kependudukan Gratis
Program Peningkatan Jaminan Sosial	Pemantapan Sistem Jaminan Sosial Nasional Peningkatan Jumlah Peserta Jaminan Sosial
Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Bantuan Pangan dan Gizi Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Pengembangan Perumahan Rakyat
Program Percepatan Masalah Penanggulangan Kemiskinan	Konsolidasi LSM bidang sosial dan kemiskinan Penguatan Basis Data Kemiskinan Konsolidasi potensi CSR Beasiswa Mahasiswa/Siswa Miskin Sosialisasi program jaminan sosial nasional Peningkatan kapasitas SDM RSUD

Paket Kebijakan Ekonomi 6: Pengembangan Pariwisata dan Bahari

Program	Kegiatan
Program Percepatan KEK Tanjung Kelayang	Promosi Peluang Investasi kepada Investor
Program Pengembangan Destinasi/Objek Wisata	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW)
Program Promosi Destinasi Wisata	Pembentukan Portal Wisata Bangka Belitung
Program Pekan Seni dan Budaya	Penyelenggaraan Pekan Seni dan Budaya Tahunan
Program Pembentukan Badan Promosi Pariwisata	
Program Bahari	Peningkatan Produktivitas Nelayan Pengembangan Industri pendukung perikanan
Program Percepatan Masalah Pengembangan Pariwisata	Pengembangan materi promosi
Program Percepatan Masalah Pengembangan Bahari	Penyusunan rencana induk bahari Mendorong kelompok usaha memiliki badan hukum Sistem informasi harga ikan online Dukungan TIK sektor bahari

Paket Kebijakan Ekonomi 7: Pengembangan Agropolitan

Program	Kegiatan
Program Kawasan Sentra Pangan Modern	Pengembangan kawasan-kawasan Sentra Pangan Modern Pengembangan Industri Pendukung Sentra Pangan yang terintegrasi
Program Kawasan Sentra Peternakan Modern	Pengembangan kawasan-kawasan Sentra Peternakan Modern Pengembangan Industri Pendukung Sentra Peternakan yang terintegrasi
Program Percepatan Masalah Agropolitan	Penyusunan rencana induk agropolitan Verifikasi rencana dan pembangunan irigasi Perbaikan distribusi dan akses petani pada sarana produksi pertanian Peningkatan Kualitas Pembenihan dan Pembibitan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Peningkatan Akses Permodalan Rehabilitasi irigasi Rehabilitasi bendung Dukungan TIK sektor agropolitan Pembentukan gugus tugas Reforma Agraria Identifikasi TORA

Paket Kebijakan Ekonomi 8: Penguatan Fiskal Daerah

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja dan Investasi	Meningkatkan Rasio Belanja Modal
Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Desa	Pelatihan Aparatur Desa
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemetaan Potensi PAD Intensifikasi PAD Ekstensifikasi PAD Revitalisasi Unit-unit Penerimaan Daerah
Program Peningkatan Daya Saing BUMD	Peningkatan Kerjasama dengan Swasta Peningkatan Kapasitas SDM BUMD
Program Percepatan Penguatan Fiskal	Pembenahan dokumen perencanaan keuangan daerah Pembenahan pengelolaan aset daerah Pemanfaatan Aset-aset Produktif Daerah